

BAB II

Kebijakan Kepulauan Marshall secara Nasional dan Internasional dalam Mengatasi Perubahan Iklim

Kepulauan Marshall merupakan negara kepulauan di Samudera Pasifik yang sangat rentan dengan perubahan iklim, untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah Kepulauan Marshall telah menetapkan beberapa kebijakan nasional maupun internasional dalam mengatasi masalah tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua kebijakan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Meskipun telah dibentuk sedemikian baik, keberhasilan kebijakan tidak bisa lepas dari faktor-faktor tertentu. Pada bab ini, dibahas mengenai Kepulauan Marshall, Dampak perubahan iklim, Keterlibatan negara lain dalam peningkatan dampak perubahan iklim, serta Kebijakan nasional dan internasional yang telah diimplementasikan oleh Kepulauan Marshall dalam mengatasi perubahan iklim.

2.1 Kepulauan Marshall

Republik Kepulauan Marshall merupakan negara yang berdaulat dan terletak di tengah Samudra Pasifik, antara Hawaii dan Australia. Kepulauan Marshall terdiri dari lebih 1.000 pulau kecil yang tersebar di area seluar 750.000 mil persegi. Negara ini merupakan bagian dari wilayah Mikronesia Oseania yang memiliki populasi sekitar 59.000 orang (Kiste, 2023). Pada awalnya, Kepulauan Marshall ditinggali oleh orang Mikronesia (Britannica, 2022).

Orang-orang Mikronesia tersebut mempunyai budaya yang sangat kompleks seperti dalam bidang pelayaran, pertanian, dan bentuk kesenian yang unik (Cartright, 2013). Pulau-pulau di Kepulauan Marshall tersebut dijajah oleh Spanyol pada abad ke-16. Lalu menjadi bagian dari kekaisaran Jerman pada abad ke-19. Setelah kejadian Perang Dunia pertama, pulau-pulau di Kepulauan Marshall diambil alih oleh Pemerintah Jepang dan termiliterisasi selama Perang Dunia II (Cartright, 2013).

Setelah Perang usai, Kepulauan Marshall berada di pengawasan administrasi Amerika Serikat sebagai bagian dari Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik, didirikan oleh *United Nations* dengan tujuan mengawasi administrasi berbagai negara kepulauan di kawasan pasifik. Kemudian, Kepulauan Marshall diakui merdeka sepenuhnya pada tahun 1986 sekaligus turut menandatangani *Compact of Free Association* oleh Amerika Serikat, yang mana bertujuan untuk memberikan bantuan kepada negara Kepulauan Marshall, terutama dalam bidang keuangan dan penggunaan fasilitas militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat (Cartright, 2013).

Kepulauan Marshall sama dengan negara kepulauan lainnya yang mana memiliki sumber daya alam yang terbatas. Kegiatan perekonomian Kepulauan Marshall adalah perikanan, pertanian, dan pariwisata. Sumber daya utama perikanan Kepulauan ini adalah ikan tuna dan sumber daya laut lainnya. Perairan Kepulauan Marshall kaya akan tuna dan telah menjadi ekspor terbesar negara tersebut.

Kepulauan Marshall dan negara kepulauan lainnya menghadapi

tantangan yang signifikan dalam menghadapi dampak perubahan iklim(CCKP, 2021). Kepulauan Marshall di Kawasan Pasifik adalah termasuk negara yang sangat vokal dalam tindakan global untuk mengatasi perubahan iklim dan meminta masyarakat internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta memberikan perlindungan bagi negara kepulauan yang sangat rentan.

Iklm tropis basah mempengaruhi cuaca di Kepulauan Marshall. Menurut meterologi musim di kepulauan Marshall terjadi empat kali setiap tahunnya, yaitu musim semi pada 1 Maret – 21 Maret, musim panas pada 1 Juni – 31 Agustus, musim gugur pada 1 September – 30 November, dan musim dingin pada 1 Desember – 28 Februari. Suhu stabil sepanjang tahun terjadi sekitar 28 derajat – 29 derajat celcius. Di Majuro, bulan Januari, Februari, dan Maret merupakan bulan terkering, dan periode dari September – Desember merupakan bulan terbasah. Suhu stabil sepanjang tahun terjadi sekitar 26 derajat celcius dan 30 derajat celcius. Iklim tropis di Kepulauan Marshall memiliki rata-rata 28 derajat celcius, yang mana kelembabannya relatif hingga 80% dipengaruhi oleh angin. Curah hujan tahunan terjadi sekitar 500 – 800 mm di sebelah utara dan 4000 mm di sebelah selatan. Majuro di Kepualaun Marshall memiliki suhu rata-rata tahunan curah hujan sekitar 3388 mm. Hujan jatuh mulai dari bulan Januari hingga Maret disertai dengan angin topan, untuk intensitas tinggi curah hujan terjadi dari bulan Mei hingga November (Hikersbay, 2023).

Kepulauan Marshall sebagai negara yang sangat rentan dengan dampak

perubahan iklim memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan dukungan dari aktor internasional lainnya, seperti organisasi internasional dan negara lain, terutama negara maju seperti Amerika Serikat dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Namun, kurangnya upaya yang signifikan dari negara-negara penghasil emisi gas utama dalam meminimalkan emisi gas rumah kaca melemahkan upaya negara-negara kepulauan kecil seperti Kepulauan Marshall dalam mengatasi perubahan iklim. Ada berbagai alasan mengapa beberapa negara mungkin tidak mau membantu Kepulauan Marshall dan negara berkembang kepulauan kecil lainnya mengatasi dampak perubahan iklim.

Populasi di Kepulauan Marshall tergolong kecil dan tersebar dan mempersulit penciptaan skala ekonomi dan pencapaian massa kritis yang diperlukan sehingga banyak bisnis yang dapat bertahan secara ekonomi. Kepulauan Marshall terdiri dari sekelompok pulau kecil di Samudra Pasifik dengan total luas daratan 180 kilometer persegi. Pulau-pulau tersebut terletak di bagian dunia yang terpencil di mana jauh dari pusat populasi besar lainnya yang membatasi perkembangan dan aksesibilitasnya.

Isolasi geografis dan sumber daya yang terbatas menyebabkan populasi yang kecil tersebar di Kepulauan Marshall. Populasi kecil Kepulauan Marshall berarti terdapat tenaga kerja dan pasar yang terbatas untuk barang dan jasa. Hal tersebut dapat mempersulit bisnis untuk berkembang dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Di samping itu, Kepulauan Marshall dijadikan tempat sebagai uji coba nuklir oleh Amerika.

Selama perang dunia kedua, pulau-pulau yang dijadikan tersebut diduduki oleh Jepang dan digantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan administrasi di bawah Perwalian Perserikatan Bangsa- Bangsa. Secara keseluruhan, populasi yang kecil dan tersebar menciptakan beberapa tantangan dalam mencapai pembangunan ekonomi di Kepulauan Marshall.

P u l a u - p u l a u di Kepulauan Marshall tersebut hanya berada di sekitar 2 meter di atas permukaan laut (MULHERN, 2020). Negara kepulauan tersebut menghadapi masalah penangkapan ikan yang berlebihan, degradasi lahan, dan akses terbatas ke sumber daya air tawar (Tjiptabudy et al., 2016). Kepulauan Marshall dapat melakukan penangkapan ikan untuk dikonsumsi secara domestik maupun diekspor. Namun, banyaknya pulau di kepulauan tersebut menciptakan garis pantai yang luar sehingga menjadi sulit untuk dipantau dan diregulasi. Hal tersebut menyebabkan ikan menjadi habis stok dikarenakan penangkapan ikan yang berlebihan dan praktik-praktik penangkapan yang merusak seperti menggunakan dinamit dan sianida. Kegiatan tersebut mengancam penurunan populasi ikan dan kerusakan ekosistem laut.

Kurangnya sumber daya alam membatasi kemampuan negara untuk menghasilkan pendapatan melalui ekstraksi sumber daya atau pertanian di Kepulauan Marshall. Kepulauan Marshall memiliki sumber daya alam yang minim dikarenakan terdapat kombinasi faktor termasuk geologi, sejarah, dan geografi. Pertama, kepulauan Marshall terdiri dari atol karang dataran rendah yang membuat mereka hanya memiliki sedikit lahan subur untuk

mengembangkan pertanian dan sedikit sumber daya mineral. Kedua, Kepulauan Marshall memiliki sejarah kolonialisme dan uji coba nuklir di mana semakin membatasi sumber daya alamnya. Pulau tersebut dijajah oleh negara lain termasuk Jerman, Spanyol, dan Jepang sebelum diduduki oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia kedua. Setelah perang, Amerika Serikat menggunakan Kepulauan Marshall demi mewujudkan tujuan militer dan melakukan serangkaian uji coba nuklir di pulau-pulau Kepulauan Marshall antara tahun 1946 dan 1958.

Uji coba nuklir membuat pulau-pulau tersebut terontaminasi dan menjadi tidak dapat dihuni di mana semakin membatasi potensi pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Namun berbeda dengan Singapura, negara kepulauan kecil di Asia Tenggara yang memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas, di mana negara tersebut menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling makmur di dunia melalui bidang manufaktur, keuangan, dan bidang jasa lainnya (Bank, 2017). Negara tersebut juga menjadi donor utama terhadap bantuan internasional dan penanggulangan bencana dikarenakan ekonomi dan institusi yang berkembang dengan baik. Sejalan dengan Jepang yang telah menjadi kontributor utama terkait bantuan internasional kepada negara lain dikarenakan memiliki kapasitas dalam mengembangkan teknologi canggih dan hubungan diplomatik yang kuat dengan negara lain.

Dalam praktik pertanian, penduduk juga masih melakukan penggundulan hutan yang menyebabkan erosi dan degradasi tanah serta

mengurangi kesuburan dan produktivitas lahan. Selain itu, dampak perubahan iklim seperti intrusi air asin memperburuk degradasi lahan dan membatasi ketersediaan lahan subur. Banyak pulau di Kepulauan Marshall tidak memiliki akses ke sumber daya air tawar (Tjiptabudy et al., 2016). Permintaan terhadap air yang meningkat karena pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi juga memberikan tekanan tambahan pada sumber daya.

Kepulauan Marshall memiliki sistem perawatan kesehatan yang terbatas dan tergolong kecil sehingga mempersulit proses penyediaan perawatan yang memadai bagi para penduduknya (Project, 2021). Terdapat juga masalah terkait lainnya seperti akses ke perawatan medis serta masalah keterjangkauan dan perlindungan asuransi. Dikarenakan faktor sejarah yang kompleks di mana terdapat kolonisasi oleh berbagai negara dan dampak uji coba nukli pada pertengahan abad ke-20 di Kepulauan Marshall membuat dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat negara tersebut.

Terlebih lagi isolasi geografis yang mempersulit Kepulauan Marshall untuk mengakses sumber daya dan *supply* tenaga ahli. Isolasi tersebut juga mempersulit dalam memberikan perawatan medis yang tepat waktu dan menanggapi keadaan darurat. Bidang kesehatan di Kepulauan Marshall juga mengalami kekurangan pendanaan. Dalam beberapa kasus, budaya Kepulauan Marshall menekankan kuat kepada komunitas dan keluarga di mana berdampak pada bagaimana layanan kesehatan diakses.

Kepercayaan dan praktik budaya di Kepulauan Marshall cukup bertentangan dengan praktik medis barat yang menimbulkan tantangan dalam memberikan perawatan yang efektif. Terlebih lagi, masyarakat Kepulauan Marshall cukup sering mengonsumsi diet tinggi lemak dan melakukan sedikit aktivitas fisik dan telah berkontribusi terhadap peningkatan angka penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung.

Kepulauan Marshall menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakatnya terutama anak-anak (UNICEF, 2017). Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta terdapat juga masalah yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum dan pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas guru.

Melalui faktor sejarah, di mana selama bertahun-tahun sistem pendidikan di Kepulauan Marshall didasarkan kepada model barat dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan budaya dan penduduknya. Isolasi geografis yang terpencil mempersulit penyediaan akses ke sumber daya dan teknologi pendidikan serta membatasi peluang pengembangan profesional bagi tenaga pendidik. Praktik kebudayaan dan keyakinan juga bertentangan dengan praktik pendidikan barat yang dapat menyebabkan tantangan dalam memberikan pendidikan yang efektif (UNICEF, 2017). Seperti dalam hal kebahasaan, Bahasa Marshall merupakan bahasa pertama bagi mayoritas penduduk Kepulauan Marshall.

Hal tersebut menimbulkan tantangan bagi pelajar yang cukup berjuang dengan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, di sisi lain para guru yang mungkin tidak mahir berbahasa Inggris juga dipersulit. Melalui faktor ekonomi, mayoritas keluarga di Kepulauan Marshall menghadapi tantangan terkait kemiskinan dan kurangnya akses terhadap sumber daya primer seperti air bersih dan listrik (UNICEF, 2017). Tantangan tersebut yang membuat dan mempengaruhi perkembangan pendidikan di Kepulauan Marshall.

Negara Kepulauan Marshall mempunyai kondisi perekonomian yang terbatas dan terisolasi sehingga mempersulit negara untuk mengalami perkembangan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Holden., 2003). Kepulauan Marshall sangat bergantung kepada bantuan luar negeri yang membuat perekonomiannya sangat rentan terhadap perubahan prioritas dan tingkatan pendanaan negara-negara lain atau “donor countries.” Tidak hanya Kepulauan Marshall, negara lain yang membutuhkan atau tergantung terhadap bantuan luar negeri.

Seperti Afghanistan yang merupakan penerima bantuan luar negeri terbesar di dunia dengan mayoritas bantuan berasal dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, bantuan terhadap Afghanistan difokuskan kepada bantuan ekonomi dan kemanusiaan, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, perawatan, kesehatan, dan bantuan darurat (Feiock & Stream, 2001). Haiti yang merupakan negara termiskin di dunia dan sangat bergantung kepada bantuan asing dari Amerika, Uni Eropa, Kanada, dan negara donor lainnya. Bantuan yang diterima oleh Haiti berupa bantuan

kebencanaan seperti perawatan kesehatan, dan lain-lain (Walz, 2015). Yaman juga saat ini mengalami krisis kemanusiaan terburuk di dunia dengan jutaan penduduknya membutuhkan bantuan darurat yang diperoleh dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara lainnya (Nasser, 2022).

Kepulauan Marshall sangat bergantung kepada bantuan dan dukungan dari Amerika Serikat di mana hal tersebut juga menjadi penyebab timbulnya masalah baru yakni berupa ketergantungan dan kemandirian dalam bidang ekonomi yang terbatas. Terlebih dengan keadaan ekonomi global yang ada seperti perubahan harga komoditas dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kepulauan Marshall merupakan negara dengan populasi sekitar 59.000 orang (McDonald, 2021), di mana populasi kecil tersebut sangat membatasi pasar domestik untuk barang dan jasa sehingga menyulitkan bisnis dalam mencapai skala ekonomi dan mempertahankan profitabilitas. Isolasi geografis juga mempersulit akses pasar dan membatasi peluang perdagangan serta investasi, terlebih lagi jika dibandingkan dengan ekonomi yang lebih besar dan mudah diakses.

Kurangnya infrastruktur juga membuat daya saing bisnis Kepulauan Marshall di pasar global menjadi terbatas. Selain itu, kegiatan perekonomian yang sangat bergantung pada perikanan harus tunduk dan mengikuti fluktuasi permintaan dan peraturan pasar global. Hal tersebut juga disebabkan karena kurangnya diversifikasi membatasi peluang bagi bisnis dalam memasuki pasar baru dan dapat membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi permintaan global.

Kepulauan Marshall seperti negara berkembang lainnya sedang menghadapi dilema terkait pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Feiock & Stream, 2001). Negara harus memilih apakah memprioritaskan pembangunan ekonomi jangka pendek daripada mengatasi dampak perubahan iklim terkait perlindungan lingkungan jangka panjang, terlebih lagi jika tidak tersedia dukungan internasional yang signifikan (Feiock & Stream, 2001). Hal inilah yang dapat menyebabkan terbatasnya sumber daya dan atensi yang didedikasikan dalam menangani dampak perubahan iklim serta mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam mengurangi dampaknya.

2.2 Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kepulauan Marshall

Beberapa dampak perubahan iklim di Kepulauan Marshall melingkupi lingkungan, penduduk, dan kegiatan ekonomi. Kepulauan Marshall yang terdiri dari dataran rendah membuat wilayahnya sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut. Kenaikan permukaan laut memiliki dampak yang signifikan di Kepulauan Marshall termasuk erosi pantai, sanitasi sumber air tawar, peningkatan banjir, dan punahnya keanekaragaman hayati. Naiknya permukaan laut dapat menyebabkan erosi garis pantai negara kepulauan sehingga memungkinkan tenggelamnya infrastruktur dan tempat tinggal. Air asin menyusup dan mencemari sumber air tawar di kepulauan tersebut sehingga membuatnya tidak dapat digunakan untuk konsumsi masyarakat, pertanian, dan tujuan lainnya.

Kenaikan air laut juga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan

frekuensi banjir yang dapat merusak tempat tinggal, mengakibatkan perpindahan penduduk, serta berdampak signifikan pada ekosistem laut termasuk terumbu karang dan populasi ikan yang sangat penting bagi ketahanan pangan dan industri pariwisata Kepulauan Marshall (CCKP, 2021). Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Pacific Climate Change Centre, Kepulauan Marshall telah mengalami banjir pada tahun 2014, 2015, dan 2018 yang mengakibatkan kerusakan rumah, infrastruktur, dan daratan seperti tanaman. Pada tahun 2018, keadaan darurat juga turut diumumkan di Kepulauan Marshall karena banjir yang disebabkan oleh air pasang, hujan lebat, dan gelombang badai. Banjir tersebut terjadi di Kota Majuro dan dilaporkan terdapat kerusakan parah pada rumah, sekolah, jalan, dan ratusan orang kehilangan tempat tinggal.

Banjir yang terjadi pada tahun 2014 menyebabkan sejumlah 69 rumah menjadi rusak, SD Rairok, pemakaman, bahkan bandara juga rusak akibat banjir tersebut. Terdapat empat pusat evakuasi yang dibuat di sekolah dan gereja yang menampung 800 pengungsi, sisanya memilih tinggal di hotel dan rumah keluarga atau teman yang masih layak untuk ditempati (reliefweb, 2014). Dalam mensiasati banjir yang mendatang, Menteri Perubahan Iklim Kepulauan Marshall yakni Tony de Brum mengatakan akan segera melakukan upaya pemulihan dan membangun kembali infrastruktur umum serta berharap agar perumahan warga dapat diperbaiki lebih kokoh lagi selagi menunggu upaya pencegahan banjir yang mendatang (reliefweb, 2014).

Tidak hanya banjir, menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada

tahun 1992 di Majuro oleh *National Oceanic and Atmospheric Administration*, kenaikan permukaan laut setinggi kaki akan menggenangi atol, sehingga mekanisme pertahanan dalam melindungi atol dari badai di lima puluh tahun mendatang akan semakin sulit untuk dilakukan. Terkait curah hujan yang masih memberikan pasokan air tawar pada Kepulauan Marshall juga menambah masalah baru. El Nino yang terdapat di Kawasan Pasifik mengubah pola curah hujan sehingga dapat menyebabkan kekeringan yang dapat merusak atol. Hal ini membuat Kepulauan Marshall sangat rentan terhadap kekeringan. Terdapatnya angin kencang dan gelombang run-up juga menjadi sumber banjir dan kerusakan yang signifikan di Kepulauan Marshall. Pada tahun 2008, terdapat tiga badai besar yang terjadi selama dua minggu dan air pasang sehingga menciptakan banjir yang diakibatkan oleh gelombang badai. Hasil dari peristiwa tersebut, terdapat 300 rumah di Majuro rusak dan 10% dari populasi mengungsi ke tempat penampungan sementara (Portal, 2021).

Kepulauan Marshall sangat rentan terhadap bencana alam, sehingga sulit dalam memprioritaskan pembangunan ekonomi karena beberapa alasan. Bencana alam seperti topan, gelombang badai, dan banjir yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur penting, termasuk jalan, jembatan, dan bangunan. Hal tersebut dapat mengganggu kegiatan perekonomian dan jasa, sehingga mempersulit bisnis untuk beroperasi secara efektif. Biaya perbaikan atau pembangunan kembali infrastruktur setelah bencana alam dapat mengalihkan sumber daya dari prioritas pembangunan

ekonomi lainnya.

Bencana alam juga berdampak signifikan kepada kesehatan dan kesejahteraan penduduk termasuk peningkatan angka cedera, penyakit, dan kematian. Hal tersebutlah yang menyebabkan hilangnya produktivitas dan menambah beban pada sistem perawatan kesehatan yang semakin membatasi pembangunan ekonomi. Risiko bencana alam juga dapat menghambat investasi asing dan pariwisata, di mana keduanya sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Investor dan para wisatawan mungkin ragu untuk memberikan sumber daya terhadap wilayah yang berisiko tinggi terhadap bencana alam, terutama jika terdapat riwayat kerusakan dan gangguan yang signifikan setelah kejadian di masa lalu. Kepulauan Marshall rentan terhadap perubahan iklim, termasuk kenaikan muka air laut, pengasaman laut, dan perubahan pola cuaca.

Di saat karbon dioksida diserap oleh laut dan mengubah kandungan kimiawi air yang mana menjadikannya lebih asam. Proses pengasaman laut dapat merusak ekosistem laut termasuk terumbu karang sehingga mengancam keanekaragaman hayati (UNEP, 2017). Perubahan iklim menjadi penyebab atas hilangnya keanekaragaman hayati di Kepulauan Marshall diakibatkan oleh pengasaman laut yang membahayakan spesies dan ekosistem laut (UNEP, 2017)

Tidak hanya ekosistem lautan, warga negara Kepulauan Marshall juga akan terkena dampak dari perubahan iklim. Dilansir dari penelitian Internal Displacement Monitoring Centre atau IDMC bahwa bahaya perubahan iklim

akan menjadi alasan dan pendorong yang kuat untuk perpindahan penduduk di masa depan (IDMC, 2022). Namun, hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan.

Seperti yang telah dinyatakan di dalam laporan Organisasi Kesehatan Dunia terkait COP26, perubahan iklim merupakan ancaman kesehatan nomor satu yang dihadapi oleh umat manusia (WHO, 2022). Perubahan iklim juga berpotensi menyebabkan berbagai dampak signifikan terkait kesehatan, termasuk penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air seperti penyakit diare, penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti demam berdarah, peningkatan kerawanan pangan dan air yang dapat menyebabkan masalah pemenuhan gizi, dan terganggunya sistem kesehatan karena peristiwa cuaca ekstrim yang disebabkan oleh iklim dan kenaikan muka air laut (NIH, 2015).

International Federation of Red Cross atau yang disingkat IFRC menyatakan bahwa terdapat lebih dari 3.388 kasus penyakit yang mirip dengan demam berdarah di Kepulauan Marshall, sejumlah 1.576 kasus telah dikonfirmasi secara laboratorium. Situasi ini bersamaan dengan dunia menghadapi Covid-19. Penyakit ini tercipta dikarenakan kurangnya air bersih yang meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat, sehingga tidak hanya penyakit demam berdarah, namun akan terdapat penyakit lain yang dapat ditularkan melalui air (IFRC, 2020).

Asian Development Bank, 2013 menemukan bahwa dampak ekonomi dari perubahan iklim di Kepulauan Marshall akan semakin parah dikarenakan terdapat kerugian di berbagai sektor, terutama di sektor

perikanan, pariwisata, dan pertanian. Hal tersebut dipercaya dapat mengakibatkan kerentanan ketahanan pangan dan meningkatkan kemiskinan bagi masyarakat di Kepulauan Marshall (ADB, 2013). Dampak perubahan iklim memiliki implikasi terhadap ketahanan pangan, kemiskinan, dan pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. Menurut World Food Programme (WFP) dikalkulasikan terdapat 65% rumah tangga di Kepulauan Marshall mengalami kerentanan pangan pada tingkat sedang hingga parah. Krisis tingkat kemiskinan nasional di Kepulauan Marshall mencapai 30%. Disebabkan oleh keterbatasan sumber daya lahan dan air, ketergantungan pangan impor, dan dampak perubahan iklim terhadap beberapa sektor seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Sebanyak 31 bayi meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun diakumulasikan untuk 1.000 bayi yang lahir di Kepulauan Marshall pada tahun 2020 (ADB, 2020).

Masyarakat yang kehilangan lahan akan sulit mempertahankan budaya tradisional mereka. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations menyatakan bahwa pentingnya bantuan internasional dalam menyelamatkan budaya dan sumber daya alam Kepulauan Marshall (UNESCO, 2012).

Kurangnya infrastruktur yang memadai mempersulit Kepulauan Marshall dalam memprioritaskan pembangunan ekonomi dikarenakan oleh beberapa alasan. Infrastruktur yang terbatas dapat mempersulit penduduk Kepulauan Marshall dalam mengakses layanan dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan listrik. Kurangnya akses ke layanan tersebut

membatasi pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan untuk pertumbuhan perekonomian.

Biaya transportasi tinggi, Kepulauan Marshall merupakan negara yang tersebar secara geografis di mana terdiri lebih dari 1.000 pulau yang tersebar di area seluas sekitar 750.000 mil persegi. Dampaknya biaya transportasi menjadi tinggi yang dapat membatasi perdagangan dan pergerakan barang dan jasa, sehingga menghambat kemajuan perekonomian. Kepulauan Marshall memiliki pasokan energi yang terbatas dikarenakan sangat bergantung terhadap bahan bakar fosil impor untuk pasokan energinya. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat sulitnya pengembangan sumber energi alternatif seperti surya dan angin. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil tersebut menciptakan biaya energi menjadi tinggi yang membatasi daya saing bisnis lokal.

Investasi yang terbatas, infrastrukturyang terbatas membuat Kepulauan Marshall kurang menarik bagi calon investor. Investor menjadi enggan untuk melakukan investasi di negara yang tidak memiliki infrastruktur dasar di mana diperlukan dalam peningkatan ekonomi. Infrastruktur mempersulit Kepulauan Marshall dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakatnya. Tanpa adanya akses ke transportasi yang andal, energi dan layanan dasar lainnya mempersulit menarik bisnis yang dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Dampak perubahan iklim di Kepulauan Marshall sangat signifikan dan berkelanjutan serta merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup penduduk negara tersebut.

2.3 Kontribusi dan Hubungan Negara Lain terhadap Kepulauan Marshall dalam Perubahan Iklim

Satu negara memiliki prioritas yang berbeda dengan negara lainnya dalam mengatasi perubahan iklim sebagai isu global. Setiap negara juga memiliki tantangan tersendiri dalam mengatasinya, ada beberapa negara yang lebih mementingkan masalah domestik dan penduduk aslinya terlebih dahulu daripada membantu dalam menyelesaikan kewajiban internasional seperti membantu negara kepulauan kecil. Setiap negara pasti menempatkan prioritasnya terlebih dahulu dikarenakan masing-masing negara memiliki kebutuhan dan tujuan yang unik, terutama dalam memprioritaskan masalah tertentu memungkinkan mereka harus melakukan alokasi sumber daya dan upaya dalam mencapai tujuan tertentu. Prioritas negara juga bervariasi yang mana bergantung pada beberapa faktor seperti ekonomi negara, masalah sosial, masalah keamanan, masalah lingkungan, dan hubungannya negara tersebut dengan negara/aktor internasional lainnya. Dengan menetapkan prioritas yang jelas, negara pastinya akan lebih efektif dalam mengembangkan kebijakan dan strategi di mana mencerminkan nilai dan aspirasi mereka. Ada beberapa contoh negara yang memprioritaskan dirinya sendiri terlebih dahulu, yang mana hal ini dikenal dengan istilah “realisme”. Pendekatan atau teori ini beranggapan bahwa negara adalah aktor utama dalam politik dunia dan mereka termotivasi oleh kepentingan pribadi, kekuasaan, dan hubungan terkait masalah keamanan. Teori tersebut juga memprioritaskan kepentingannya sendiri di atas segalanya di mana negara

bersedia untuk menggunakan segala cara yang diperlukan dalam mengamankan kedaulatan mereka dalam sistem internasional (Antunes & Camisao, 2018).

Hal tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk aksi, di mana antara lain: mengejar dominasi ekonomi dan militer, membentuk aliansi dengan negara lain untuk meningkatkan kekuatannya, terlibat dalam konflik untuk melindungi keamanan nasionalnya (Antunes & Camisao, 2018). Negara yang cukup menonjol dalam memprioritaskan kepentingannya terlebih dahulu adalah Amerika Serikat, di mana Pemerintahan Amerika Serikat di bawah mantan Presidennya yaitu Donald Trump menjalankan kebijakan “America First” (Larres, 2020). Kebijakan tersebut difokuskan untuk melindungi kepentingan Amerika, seperti dalam hal perekonomian, pengendalian imigrasi, dan penarikan diri dari perjanjian dan organisasi internasional tertentu (Larres, 2020). Oleh karena itu, gagasan dalam memprioritaskan kepentingan sendiri tidaklah hal yang unik di Amerika Serikat dan telah diadopsi oleh banyak negara lain sepanjang sejarah.

Penyebab utama perubahan iklim berasal dari aktivitas manusia. Pembakaran batu bara, minyak, dan gas untuk memperoleh sumber daya energi mengharuskan terjadinya pelepasan karbon dioksida ke atmosfer yang merupakan kontributor signifikan pada dampak perubahan iklim. Menurut Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, konsumsi minyak bumi, batu bara, dan gas alam global mencapai rekor tertinggi pada tahun 2019 di mana bahan bakar tersebut menyumbang lebih dari 80% konsumsi energi

global (EIA, 2021). Deforestasi merupakan penyebab perubahan iklim yang lain, di saat terjadi pembakaran hutan dan degradasi lahan maka karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer di mana berkontribusi terhadap perubahan iklim. Menurut *World Wildlife Fund*, terdapat sekitar 17% hutan hujan Amazon sudah dihancurkan selama 50 tahun terakhir (Galford, 2010).

Pertanian, terutama yang menggunakan pupuk juga bertanggung jawab atas terciptanya emisi gas rumah kaca yang signifikan. Menurut PBB, peternakan merupakan penyebab terjadinya 14,5% emisi gas rumah kaca secara global (EPA, 2023). Dalam bidang industri terutama dalam pembuatan semen dan produksi bahan kimia juga turut dalam pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Menurut IPCC atau yang disebut Intergovernmental Panel on Climate Change, Bidang industri menjadi salah satu penyebab terjadinya 19% emisi gas rumah kaca global (IPCC, 2014).

Terdapat fakta-fakta yang menjustifikasi penyebab perubahan iklim tersebut, diantaranya, Tingkat CO₂ pada atmosfer telah meningkat lebih dari 40% sejak revolusi industri. 20 terakhir menjadi tahun-tahun panas sejak 1981 dengan 2016 dan 2020 menjadi tahun terpanas dalam sejarah (NOAA, 2022a). Luas es laut Arktik menurun sekitar 13,1% selama per dekade sejak tahun 1979 dan permukaan laut global telah naik sekitar 8 inci atau 20 cm sejak tahun 1880 (NASA, 2022). Deforestasi menyumbang sebesar 10% pada emisi gas rumah kaca global (WWF, 2023). Pelepasan gas rumah kaca sebesar 16% dan dua pertiganya berasal dari aktivitas manusia, termasuk peternakan (UNEP, 2021).

Negara-negara yang menghasilkan emisi gas karbon dioksida (CO₂) sebesar 67% dan merupakan penghasil yang terbesar pada tahun 2020 menurut Global Carbon Project yaitu China, Amerika Serikat, India, Rusia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Iran, Kanada, Arab Saudi (WRI, 2020). Peningkatan suhu, pencairan gletser, dan kenaikan muka air laut merupakan indikator dari perubahan iklim. Melalui analisis perubahan iklim di masa lalu, laju perubahan iklim yang terjadi saat ini belum pernah terjadi dalam waktu 800.000 tahun terakhir dan sangat tidak mungkin jika hanya disebabkan oleh faktor alam saja. Manusia secara konsisten telah menghasilkan gas rumah kaca dan kerusakan alam lainnya, oleh karena itu dibutuhkan tindakan dalam memitigasi dampak perubahan iklim.

Negara China merupakan salah satu negara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca terbesar dan penyumbang utama perubahan iklim. Sejalan dengan laporan IPCC yang membuktikan bahwa China sebagai penghasil karbon dioksida terbesar di dunia telah memberikan 28% emisi global pada tahun 2010 lalu (IPCC, 2014). World Meteorological Organization menyatakan bahwa pada tahun 2019 hingga 2020 tercatat bahwa terdapat peningkatan yang sangat besar oleh China meskipun terjadi perlambatan kegiatan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 (WMO, 2021). Kontribusi China terhadap perubahan iklim diwujudkan karena ketergantungan terhadap batu bara untuk pembangkit energi di mana merupakan sumber utama emisi karbon. Negara tersebut merupakan konsumen batu bara terbesar di dunia dan jika dihitung tergolong setengah

dari konsumsi batu bara secara global. China memiliki pertumbuhan populasi dan industrialisasi yang meningkatkan emisi dari bidang transportasi dan manufaktur.

China dengan Kepulauan Marshall terlibat dalam bidang perdagangan dan bentuk kerja sama lainnya, namun tidak memiliki hubungan diplomatik formal antar keduanya. Kepulauan Marshall telah menerima bantuan keuangan dari China demi mendukung infrastruktur dan proyek pembangunan lainnya (U. C.-F. A. S. S. S. Group, 2022). Kepulauan Marshall mengakui Taiwan sebagai pemerintah China yang sah di mana menyebabkan ketegangan antara Kepulauan Marshall dengan Republik Rakyat China. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kepulauan Marshall telah berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan China serta mengakui pengaruh dalam bidang ekonomi dan politik yang dimiliki Tiongkok di kawasan Pasifik sangatlah besar. Bantuan dari China kepada Kepulauan Marshall dapat diketahui dari bukti bahwa China terlibat dalam memberikan investasi kepada negara-negara Kepulauan Pasifik.

Bantuan China kepada kawasan Pasifik merupakan bagian dari *Belt and Road Initiative* yang bertujuan dalam mempromosikan pembangunan ekonomi dan konektivitas di negara-negara di sepanjang rute perdagangan Jalur Sutra kuno atau yang disebut "*ancient Silk Road trade routes*" (Bileta, 2022). Sebagai bagian dari hal ini, China telah memberikan penawaran berupa pinjaman, hibah, dan investasi ke negara-negara Kepulauan Pasifik dalam berbagai proyek, termasuk pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan

pertanian (Palatino, 2023). Dalam penawarannya terhadap Kepulauan Marshall, China sudah terlibat dalam membiayai dan melakukan proyek infrastruktur yang besar, seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi. China juga telah memberikan bantuan teknis dan program pelatihan dalam membantu negara tersebut untuk mengembangkan sumber daya manusianya dan membangun kapasitasnya secara mandiri dan efektif.

Di samping China memberikan bantuan kepada Kepulauan Marshall, negara tersebut menciptakan tantangan keberlanjutan terkait utang bagi negara-negara Kepulauan Pasifik, khususnya dalam konteks sumber daya laut mereka. China membuat negara tersebut jatuh ke dalam siklus utang karena ketidakmampuan mereka dalam membayar kembali pinjaman terkait proyek BRI atau *Belt and Road Initiative* tersebut, di mana dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap kedaulatan dan stabilitas regional mereka (Pryke et al., 2019). Oleh karena itu dibutuhkan praktik-praktik dalam pemberian pinjaman yang lebih transparan dan bertanggung jawab di Kawasan Pasifik (Pryke et al., 2019).

Secara menyeluruh, bantuan keuangan China terhadap Kepulauan Marshall merupakan usaha dalam meningkatkan keterlibatan dan pengaruhnya di Kawasan Pasifik. Kepulauan Marshall merupakan negara yang berdaulat dengan sistem pemerintahannya yang dapat membuat kebijakan atas keputusan yang dibuatnya sendiri namun masih dipengaruhi oleh negara lain terutama China atas aspek kebijakan tertentu melalui ikatan ekonomi dan politik.

Menurut laporan IPCC, Amerika Serikat merupakan penghasil karbon dioksida terbesar kedua dan telah menyumbang 14% emisi global pada tahun 2010 (IPCC, 2014). National Oceanic and Atmospheric Administration atau yang disingkat NOAA melaporkan bahwa konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah meningkat secara signifikan sejak revolusi industri dan Amerika Serikat menjadi salah satu penyumbang terbesar (NOAA, 2022). Emisi gas rumah kaca dari Amerika Serikat terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan industri, transportasi, dan sumber pembangkit listrik lainnya (NOAA, 2022). Faktor eksternal dalam perpolitikan juga datang dari Amerika Serikat di mana mempengaruhi kebijakan Kepulauan Marshall:

Compact of Free Association, Kepulauan Marshall dan Amerika Serikat mempunyai *Compact of Free Association* yang mana memberikan tanggung jawab kepada Amerika Serikat dalam melakukan pembelaan kepada Kepulauan Marshall (The Congressional Research Service, 2022). Hubungan ini sudah terbukti memberikan pengaruh signifikan Amerika Serikat terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan Kepulauan Marshall serta kemampuannya dalam pembuatan keputusan terkait lingkup lain, seperti dalam hal ini, perubahan iklim (State, 2021).

Strategic Interests in the Pacific Region, Kepulauan Marshall terletak di kawasan yang strategis di Kawasan Pasifik dan oleh sebab itu menjadi kepentingan Amerika Serikat dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi pengaruh dalam pendekatan

Amerika Serikat terhadap Kepulauan Marshall dan ketersediaanya dalam memberikan dukungan dan sumber daya kepada negara Kepulauan Marshall, termasuk inisiatif dalam pemberian solusi terhadap perubahan iklim (USAID, 2022).

Economic Ties, Kepulauan Marshall sangat signifikan bergantung terhadap bantuan dan dukungan dari Amerika Serikat, di mana negara Amerika merupakan mitra dagang yang utama bagi negara Kepulauan Marshall (USAID, 2022). Memiliki ketergantungan dalam perekonomian menciptakan pengaruh yang signifikan oleh Amerika Serikat terhadap kebijakan ekonomi Kepulauan Marshall, termasuk yang berhubungan dengan penanganan terkait dampak perubahan iklim.

Political Influence, Negara Amerika Serikat mempunyai pengaruh yang sangat penting dengan Kepulauan Marshall, dimana melihat perannya sebagai negara pemberi bantuan yang utama. Kehadiran militer yang diberikan oleh Amerika Serikat di kawasan pasifik dan statusnya sebagai penguasa/pemimpin dunia sangat berdampak bagi kemampuan Kepulauan Marshall dalam mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan terkait perubahan iklim yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan dan prioritas Amerika Serikat.

Hubungan Kepulauan Marshall dan Amerika Serikat sangatlah berdampak terhadap kebijakan-kebijakan Kepulauan Marshall, khususnya dalam hal perubahan iklim, *Compact of Free Association*, *Strategic Interests in the Pacific Region*, *Economic Ties*, dan *Political Influence* sangatlah

memiliki peran yang membentuk hubungan antara kedua negara tersebut (The Congressional Research Service, 2022).

Jepang juga merupakan negara yang menyebabkan perubahan iklim dan penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Menurut laporan IPCC, Jepang telah menghasilkan 3,7% emisi global pada tahun 2010 dan menjadi penghasil emisi karbon dioksida terbesar kelima (IPCC, 2014). Emisi tersebut berasal dari sektor pembangkit listrik dan transportasi. Jepang menjadi negara yang bergantung pada batu bara dan gas alam, di mana negara tersebut merupakan produsen utama transportasi di dunia. Setelah Sembilan tahun berlalu, emisi karbon global yang dihasilkan Jepang menurun menjadi 3,3% pada tahun 2019. Hal ini membuktikan secara absolut bahwa emisi karbon Jepang relatif stabil selama decade terakhir. Emisi tahunan diperkirakan berkisar 1,2 hingga 1,4 miliar metrik ton CO₂.

World Resources Institute melalui penghitungan *Climate Data Explorer* menyatakan bahwa emisi gas rumah kaca Jepang masih relatif stabil sejak awal tahun 2000-an meskipun emisi tersebut baru saja mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Namun, tetap saja emisi yang dihasilkan Jepang menuai kritikan dan diharuskan untuk menetapkan target yang lebih tinggi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (WRI, 2015). Jepang dan Kepulauan Marshall memiliki tingkat emisi karbon yang sangat berbeda. Oleh sebab itu, yang menjadi korban dalam kasus ini ialah Kepulauan Marshall yang hanya menyumbangkan emisi sekitar 0,05 juta metrik ton CO₂ pada tahun 2019. Kepulauan Marshall menjadi sangat rentan

dikarenakan letak geografisnya yang rendah terhadap kenaikan permukaan laut.

Kerja sama antara Jepang dan Kepulauan Marshall tergolong erat dan dibangun atas komitmen bersama dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan pasifik dan sekitarnya. Kerja sama politik Jepang dan Kepulauan Marshall dapat dibuktikan dengan partisipasi kedua negara dalam organisasi dan forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Forum Kepulauan Pasifik, dan Komunitas di Kawasan Pasifik. Melalui organisasi dan komunitas tersebut, Jepang dan Kepulauan Marshall telah bekerja sama dalam mengatasi tantangan regional global seperti perlucutan senjata dan pembangunan berkelanjutan.

Kerja sama antara Jepang dan Kepulauan Marshall di bidang perlucutan senjata adalah partisipasi bersama kedua negara dalam menyupayakan usaha internasional dalam mencegah proliferasi senjata pemusnah massal dalam mempromosikan perlucutan senjata secara lebih luas (NTI, 2023), hal ini termasuk juga ke dalam partisipasi mereka dalam inisiatif perlucutan senjata regional, seperti di Forum Kepulauan Pasifik dan dukungan kedua negara terhadap perjanjian pelucutan senjata internasional termasuk Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.

Selain hubungan kedua negara tersebut dalam organisasi dan komunitas internasional. Negara-negara tersebut juga terlibat dalam dialog politik bilateral secara langsung mengenai berbagai masalah yang menjadi perhatian bersama, di mana hal tersebut menjadi peluang bagi kedua negara

untuk saling bertukar pandangan dan mengoordinasikan posisi mereka ke dalam berbagai topik termasuk keamanan regional dan pembangunan ekonomi. Contoh lain terkait kerjasama politik antara Jepang dan Kepulauan Marshall adalah terkait dukungan Jepang terhadap upaya negara Kepulauan Marshall dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaultannya. Jepang telah memberikan bantuan keuangan dan teknis secara signifikan kepada Kepulauan Marshall selama bertahun-tahun dan membantu negara tersebut dalam membangun institusi dan infrastruktur yang diperlukan.

UNDP “*United Nations Development Programme*” sebagai salah satu partner dengan Jepang dalam memberikan bantuan berupa proyek terkait kesiapan dan pembangunan infrastruktur bencana kepada Kepulauan Marshall yang dibantu oleh *Disaster Risk Management National Action Plan* selama 6 tahun (Pacific Office, 2019). Total dana yang akan diberikan oleh Pemerintah Jepang kepada Kepulauan Marshall sebanyak 5,887,979 dollar (Pacific Office, 2019). Tujuan dari proyek tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan UNDP antara lain untuk memperkuat sistem komunikasi bencana dan iklim serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan tanggap bencana nasional (Pacific Office, 2019).

Secara menyeluruh, dapat dinyatakan bahwa kerja sama antara Jepang dan Kepulauan Marshall di bidang politik telah berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan sehingga dalam mengambil suatu kebijakan, Kepulauan Marshall masih dipengaruhi oleh pertimbangan dari negara-negara yang telah berkontribusi dan membantunya. Hal tersebutlah

yang dapat memberikan dampak terhadap kemampuan pihak pemerintah Kepulauan Marshall dalam mengambil tindakan terhadap perubahan iklim yang terintegrasi dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing negara.

Tidak hanya Cina, Amerika, dan Jepang, Australia juga memiliki hubungan dengan kepulauan Marshall. Australia dan Kepulauan Marshall mempunyai hubungan yang erat dan telah terjalin dalam waktu yang cukup lama, dibuktikan dengan terciptanya kerja sama dalam berbagai isu politik, ekonomi, dan keamanan (Government, 2017). Australia memberikan bantuan dan pembangunan Kepulauan Marshall dan bekerja sama dengan negara tersebut dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonominya. Dalam beberapa tahun terakhir, Australia telah menyatakan dukungan kepada Kepulauan Marshall dalam berbagai bidang termasuk pemerintahan dan kesehatan. Bidang kerja sama lain antara Australia dan Kepulauan Marshall yaitu tentang keamanan regional. Australia memiliki kerja sama dengan Kepulauan Marshall dalam mengatasi tantangan keamanan regional, seperti kejahatan transnasional, dibuktikan dengan adanya *Pacific Patrol Boat Program* yang membantu membangun kapasitas negara-negara Kepulauan Pasifik dalam berpatroli di zona ekonomi eksklusif mereka (AUSTAL, 2022).

Selain dalam bidang keamanan, Australia dan Kepulauan Marshall dalam berbagai forum internasional juga memiliki hubungan, antara lain seperti dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *Pacific Islands Forum*, dimana kedua negara ini berkolaborasi dan saling mendukung kepentingan

dan prioritas masing-masing. Australia juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi kebijakan Kepulauan Marshall disebabkan karena Australia memiliki saluran komunikasi secara langsung dengan pemerintah Kepulauan Marshall dan bekerja erat dengan negara tersebut terutama dalam bidang keamanan kawasan, pembangunan ekonomi, dan pemerintahan.

2.4 Kebijakan Kepulauan Marshall dalam Mengatasi Perubahan Iklim

Kebijakan Kepulauan Marshall terbagi menjadi dua yaitu kebijakan nasional dan internasional.

2.4.1 Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional adalah panduan atau rencana yang ditetapkan oleh suatu negara dalam mengatur dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan isu-isu strategis yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan di negara tersebut. Kebijakan Nasional biasanya ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang spesifik dan dapat mencakup berbagai isu, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Adapun kebijakan-kebijakan nasional yang diimplementasikan oleh Kepulauan Marshall dalam menanggulangi perubahan iklim adalah sebagai berikut.

2.4.2 Peluncuran Proyek MI-LED (Marshall Islands-Low Emission Development)

Kepulauan Marshall telah meluncurkan proyek MI-LED atau yang disebut Marshall Islands Low Emission Development dimana bertujuan

dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Proyek MI-LED diinisiasikan untuk pembangunan lokal Kepulauan Marshall dan dipimpin oleh pihak pemerintah langsung. Proyek ini juga memiliki fungsi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan meningkatkan standar hidup masyarakat Kepulauan Marshall. Proyek MI-LED berfokus kepada perkembangan *capacity* dan *infrastructure development*, serta peningkatan akses ke pasar dan mendorong sektor swasta. Dalam menjalankan perekonomian, Republik Kepulauan Marshall mengandalkan transportasi laut dalam menghubungkan satu sama lain, yang mana hal ini sangat berfungsi bagi penyediaan layanan sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Marshall, negara tersebut juga secara eksplisit mengklasifikasikan transportasi laut domestic ke dalam *Nationally Determined Contributions* (Laurent, 2022).

Tujuan *final* dari proyek MI-LED ini diharapkan dapat menciptakan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan yang kuat di Kepulauan Marshall. Organisasi seperti *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *Global Environment Facility* (GEF) juga mendukung proyek MI-LED. UNDP sebagai salah satu mitra program ini berusaha untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon di negara tersebut. UNDP juga memberikan bantuan dan dukungan secara teknis terhadap proyek MI-LED di berbagai lingkup seperti dalam hal energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan

pengelolaan limbah yang benar. UNDP juga berkontribusi terhadap peningkatan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga lokal serta meningkatkan kesadaran terkait manfaat pembangunan rendah karbon dan mementingkan nilai *sustainability* (UNDP, 2017).

Dukungan dari UNDP terhadap proyek MI-LED juga merupakan bagian dari upaya besar secara internasional dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di mana terdapat 170 negara yang berada di dalam organisasi yang sama dan masing-masing mendukung untuk menerapkan solusi dalam mengatasi tantangan lingkungan dan pembangunan. Keterlibatan UNDP dalam proyek MI-LED adalah demonstrasi signifikan terhadap komitmen dalam mendukung negara kepulauan kecil. Dilansir dari *web page* UNDP terdapat bantuan lain yang diberikan oleh Global Environment Fund Truste sebanyak 5,018,663 dollar dimulai dari juni 2017 hingga desember 2023 (UNDP, 2017).

2.4.3 National Adaption Plan oleh Kepulauan Marshall

Kenaikan muka air laut di negara Kepulauan Marshall diperkirakan akan membahayakan 40% bangunan yang terletak di ibukota yaitu Majuro, Kepulauan Marshall serta 96% kota tersebut telah mengalami banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim (Bank, 2021). Clarence Samuel juga memperkuat pernyataan dari *World Bank Study* yaitu “Penting untuk menyoroti bahwa opsi adaptasi masih terbuka bagi Kepulauan Marshall, tindakan adaptasi yang tanggap harus cepat dilakukan untuk mencegah terjadinya migrasi” (Bank, 2021). Menanggapi ancaman ini, pemerintah

Kepulauan Marshall telah melaksanakan program nasional yang ditujukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kepulauan Marshall telah mengambil langkah dalam melakukan adaptasi dengan dampak perubahan iklim dengan memperbaiki infrastruktur, melindungi masyarakat pesisir, dan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan. Salah satu komponen kunci *National Adaptation Plan* (NAP) oleh Kepulauan Marshall yaitu dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kepulauan Marshall berjanji untuk mengurangi emisinya sebesar 32% di bawah tingkat tahun 2010 pada tahun 2025, dan untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Dalam bidang infrastruktur, adapun yang dilakukan oleh Kepulauan Marshall untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim menurut World Bank Group, antara lain:

1. Meningkatkan perlindungan pesisir, dengan cara membangun tanggul laut, menstabilisasi garis pantai, serta meninggikan bangunan serta infrastruktur penting dalam melindungi dari kenaikan permukaan laut (W. B. Group, 2021).
2. Meningkatkan sistem pengelolaan air, dengan memfokuskan kepada sistem penyimpanan, pengolahan, dan distribusi air dalam menangani intrusi air asin dan banjir.
3. Meningkatkan ketahanan energi, dengan melakukan pengembangan sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan tenaga air dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan keamanan energi.

4. Meningkatkan standarisasi pembangunan, bentuk bangunan dibuat dengan cara mengadopsi kode bangunan dan standar konstruksi yang tahan terhadap bencana alam, seperti angin topan, dan bencana lainnya.
5. Meningkatkan ketahanan pangan, dengan cara mempromosikan praktik-praktik pertanian dan akuakultur yang *sustainable* dalam memajukan terciptanya ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada pangan impor.
6. Melakukan pembinaan ketahanan masyarakat, dilakukan dengan cara mendorong inisiatif adaptasi berbasis masyarakat, contohnya dalam melaksanakan reboisasi bakau untuk memperkuat ketahanan lokal.

NAP juga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan *sustainable* terhadap dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim (W. B. Group, 2021).

Ekosistem garis pantai merupakan salah satu komponen yang penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat pesisir. Kees Van Der Geest yang merupakan seorang peneliti di Universitas Hawaii menyatakan bahwa Gelombang pasang yang semakin intensif di Kepulauan Marshall telah menyebabkan banjir dan tingkat salinitas yang tinggi terhadap tanah dan pasokan air tawar di mana memberikan pengaruh yang buruk terhadap kesehatan, ketahanan pangan, dan mata pencaharian masyarakat pesisir (Liebenguth, 2017). Oleh karena itu, dalam hal perlindungan masyarakat

pesisir, adapun yang dilakukan oleh Kepulauan Marshall untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, yaitu:

1. Melakukan penerapan terkait pengelolaan wilayah pesisir, dengan cara mengembangkan rencana pengelolaan wilayah pesisir secara komprehensif dalam memberikan perlindungan dan pelestarian pesisir dan segala bentuk sumber dayanya.
2. Meningkatkan sistem kesiapsiagaan bencana, dengan cara mengembangkan sistem peringatan dini, perencanaan terhadap evakuasi, dan kapasitas respons bencana dalam memberikan respon bencana alam dengan tanggap serta melindungi masyarakat (Liebenguth, 2017).
3. Merelokasi kelompok masyarakat, seperti kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi jika terkena banjir atau erosi pantai ke daerah yang lebih aman.
4. Meningkatkan akses ke beberapa pelayanan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan akses air minum kepada masyarakat pesisir.

Dalam Menyuarakan terkait mata pencaharian yang berkelanjutan, Pemerintah Kepulauan Marshall mendukung pertanian sebagai mata pencaharian di mana berfungsi untuk meminimalkan ketergantungan terhadap sumber daya pesisir sehingga di sisi lain dapat mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim (Alfred, 2021). Adapun cara-cara yang dilakukan melalui NAP adalah:

1. Melakukan pengembangan dan pelatihan terhadap para petani, dengan cara memberikan pendidikan terkait teknik pertanian yang optimal dan berkelanjutan kepada petani, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan teknik- teknik tersebut.
2. Melakukan promosi terkait pertanian konservasi, dengan cara menciptakan pendekatan yang meminimalisasi gangguan tanah, memperbaiki sistem tanam yang beragam, dan penggunaan bahan organik untuk menjaga kesuburan tanah (Alfred, 2021).
3. Menciptakan strategi pengelolaan air yang optimal, Pemerintah dapat berkontribusi dengan cara membantu parapetani dalam melestarikan dan mengelola sumber daya air melalui penerapan sistem irigasi yang efisien, penampungan air hujan melalui wadah, dan beberapa teknik penghematan air lainnya.
4. Mempromosikan sistem agroforesti, dengan cara melakukan integrasi pohon ke wilayah pertanian sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat seperti konservasi tanah, penyerapan karbon, dan pengelolaan air yang lebih baik dari sebelumnya.
5. Mendukung pengembangan terhadap penelitian pertanian, dengan cara melakukan investasi ke bidang pertanian oleh pemerintah dan aktor terkait lainnya.

National Adaptation Plan (NAP) yang dilakukan oleh Kepulauan Marshall dalam menghadapi perubahan iklim menunjukkan komitmen

negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memberi perlindungan bagi masyarakatnya dalam menghadapi perubahan iklim. Namun, tantangan ini sangatlah besar, diperlukan dukungan dan kerjasama dari negara-negara lain sebagai kontributor emisi gas karbon.

2.4.2 Kebijakan Internasional

Kebijakan Internasional dalam perubahan iklim adalah kebijakan yang ditetapkan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menangani dampak perubahan iklim. Kebijakan ini melibatkan kerja sama antara negara-negara dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi mitigasi dan adaptasi, serta dalam hal pendanaan, teknologi, dan transfer teknologi. Kebijakan Internasional dalam perubahan iklim juga mencakup kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam upaya untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kerja sama antara negara-negara dan sektor-sektor lain yang berhubungan penting untuk menciptakan solusi yang holistik dan efektif dalam mengatasi perubahan iklim.

2.4.2.1 Deklarasi Majuro atau “The Majuro Declaration for Climate Leadership” oleh Kepulauan Marshall

Pemerintah telah mengembangkan Deklarasi Majuro atau yang sering disebut “*Majuro Declaration for Climate Leadership*.” Deklarasi Majuro merupakan dokumen yang dikembangkan oleh pemerintah Kepulauan Marshall pada tanggal 5 September 2013 dan berfungsi untuk menciptakan komitmen dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan beralih ke sumber energi terbarukan.

Deklarasi tersebut menekankan betapa pentingnya kerja sama global dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan keterlibatan peran negara berkembang kecil “*Small Island Developing States (SIDS)*” seperti Kepulauan Marshall dalam memimpin wilayahnya. Adapun inti dari Deklarasi Majuro tersebut, meliputi :

1. Target 50% energi terbarukan pada tahun 2020: Deklarasi tersebut menetapkan target bagi negara-negara Kepulauan Pasifik untuk menghasilkan setidaknya 50% listrik mereka dari sumber terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air pada tahun 2020.
2. Deklarasi Majuro meminta negara-negara Kepulauan Pasifik untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan melakukan transisi terhadap ekonomi rendah karbon. Hal ini termasuk komitmen dalam memobilisasi dana untuk disalurkan kepada *Green Climate Fund*, sebuah mekanisme global dalam menyediakan pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang.
3. Netralitas karbon pada pertengahan abad, Deklarasi tersebut mengikat negara-negara Kepulauan Pasifik untuk berupaya mencapai netralitas karbon yang merupakan keadaan di mana emisi karbon dapat diseimbangkan dengan penghilangan karbon. Hal tersebut termasuk tujuan yang signifikan mengingat kerentanan kawasan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan peristiwa cuaca

ekstrem.

4. Promosi kerja sama regional dan internasional dalam mengatasi dampak perubahan iklim, termasuk melalui forum tertentu, seperti Pacific Islands Forum dan United Nations Framework Convention on Climate Change.

Deklarasi Majuro telah dipuji secara luas karena pendekatannya yang komprehensif dalam mengatasi perubahan iklim dan sudah berfungsi sebagai contoh bagi negara berkembang pulau kecil lainnya. Presiden Kepulauan Marshall juga telah melakukan perjalanan ke New York pada September 2013 untuk mempresentasikan Deklarasi Majuro tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB pada waktu itu. Deklarasi Majuro menekankan terkait pentingnya kerja sama dan advokasi internasional terhadap perubahan iklim, termasuk upaya dalam mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Deklarasi Majuro menjadi bukti komitmen negara-negara Kepulauan Pasifik untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Deklarasi tersebut telah diakui secara internasional sebagai kontribusi yang signifikan terhadap upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Melalui Deklarasi Majuro, Kepulauan Marshall melakukan beberapa aksi nasional dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Beberapa diantaranya *JNAP* atau *Joint National Action Plan on Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management*, *National*

Gender Equality Policy, NCCPF atau *National Climate Change Policy Framework*.

JNAP bertujuan untuk membangun ketahanan negara terhadap dampak perubahan iklim dan meningkatkan kemampuan dalam mengurangi risiko bencana. Rencana ini memberikan panduan strategis dan operasional bagi semua lembaga dan pemangku kepentingan di Kepulauan Marshall untuk bekerja bersama dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana (JNAP, 2014).

JNAP mencakup empat komponen utama, yaitu: Identifikasi Risiko dan Ancaman, JNAP melakukan analisis komprehensif terhadap risiko perubahan iklim dan ancaman bencana yang dihadapi oleh Kepulauan Marshall. Dalam hal ini, risiko iklim meliputi kenaikan permukaan air laut, kerentanan terhadap badai tropis, dan perubahan pola curah hujan, sementara ancaman bencana meliputi gempa bumi, tsunami, dan erosi pantai (JNAP, 2014).

Adaptasi Perubahan Iklim, JNAP mengembangkan strategi dan tindakan adaptasi untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Ini mencakup langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur tangguh iklim, peningkatan sistem peringatan dini, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dan penguatan ketahanan pangan (JNAP, 2014).

Pengurangan Risiko Bencana, JNAP mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana dengan pendekatan adaptasi perubahan iklim. Rencana ini mencakup langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas

respons darurat, membangun infrastruktur tahan bencana, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan pemahaman akan risiko bencana (JNAP, 2014).

Pengelolaan Rencana Aksi, JNAP menetapkan kerangka kerja pengelolaan rencana aksi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Kerangka kerja ini mencakup pemantauan dan evaluasi progres implementasi, koordinasi antarlembaga, pendanaan, dan komunikasi yang efektif untuk memastikan keberhasilan rencana aksi (JNAP, 2014).

Selanjutnya adalah *National Gender Equality Policy*, Tujuan Kebijakan Utama Pemberdayaan Gender Nasional adalah untuk membimbing proses pengembangan undang-undang, kebijakan, prosedur, dan praktik yang akan mengatasi kebutuhan, prioritas, dan aspirasi semua perempuan dan laki-laki serta secara efektif menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan. Kebijakan ini berlaku untuk sektor swasta dan publik, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kebijakan ini mensyaratkan adanya perspektif gender yang terintegrasi dalam semua kebijakan pemerintah, strategi, program, dan layanan (FAO, 2015).

Pendekatan strategis yang dipromosikan melalui Kebijakan ini didasarkan pada pendekatan multi-sektoral dan terkoordinasi di seluruh pemerintah, sejalan dengan Rencana Strategis Nasional. Kebijakan ini dirancang sebagai alat untuk dialog dan koordinasi antara sektor-sektor dan lembaga-lembaga guna mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menentukan prioritas yang disepakati dan dukungan yang

ditargetkan untuk memberdayakan perempuan dan mencapai kesetaraan gender.

2. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk mewujudkan komitmen Pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender dan hak asasi perempuan.
3. Menyelaraskan rencana nasional, termasuk rencana sektoral, untuk melaksanakan komitmen-komitmen internasional dan regional Pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Memastikan bahwa kesetaraan gender diupayakan melalui pendekatan yang sesuai dengan budaya dan sensitif terhadap budaya.
5. Melibatkan laki-laki sebagai mitra yang terinformasi dalam mencapai kesetaraan gender.
6. Menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan mengenai kemajuan sesuai dengan Rencana Strategis Nasional dan komitmen regional dan internasional lainnya dalam mencapai kesetaraan gender.

Kebijakan ini memiliki beberapa lingkup yang ingin dikembangkan, antara lain :

1. Memastikan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola yang baik untuk mencapai pemerintahan yang efektif melalui

perencanaan masyarakat dan pengembangan hubungan yang efektif antara pemerintah lokal dan nasional.

2. Memberdayakan masyarakat dan komunitas untuk mengurangi kejadian kemiskinan yang terkait dengan akses melalui perbaikan di semua bidang, termasuk sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan infrastruktur.
3. Memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan pengetahuan lokal dan tradisional untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul yang dihadapi oleh masyarakat, komunitas, dan pemerintah.
4. Membangun masyarakat yang peduli yang tercermin dalam budaya dan nilai-nilai tradisional melalui fokus yang berkelanjutan pada pemahaman budaya dan tanggung jawab budaya.
5. Mendorong inovasi masyarakat dan meningkatkan akses kesehatan dan peluang pendidikan.
6. Menghadapi tantangan globalisasi dan kerja sama regional melalui legislasi yang terfokus, perjanjian internasional, dan implementasi kebijakan regional dan nasional.
7. Memastikan pertumbuhan yang merata dan keamanan pangan melalui pendekatan lintas sektor.
8. Membangun infrastruktur yang kokoh yang menyediakan energi,

keamanan lingkungan, infrastruktur, dan transportasi bagi semua atol.

9. Meredam dampak perubahan iklim dan menciptakan kesadaran akan pentingnya aset lingkungan melalui pendekatan komunitas, nasional, regional, dan internasional.
10. Memastikan penduduk pulau-pulau terluar mendapatkan akses ke semua layanan yang diperlukan sehingga semua warga Kepulauan Marshall dapat menikmati kualitas hidup yang tinggi.

Berikutnya adalah Program *National Climate Change Policy Framework*. Kebijakan Kerangka Kerja Perubahan Iklim Nasional (*National Climate Change Policy Framework*) Kepulauan Marshall adalah suatu kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kepulauan Marshall untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan mengarahkan upaya mitigasi dan adaptasi di negara tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan ekosistem Kepulauan Marshall dari ancaman yang disebabkan oleh perubahan iklim, sambil mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon (Kiste, 2023).

Beberapa poin penting dalam Kerangka Kebijakan Perubahan Iklim Nasional Kepulauan Marshall meliputi, Identifikasi dan penilaian risiko, Kebijakan ini mendorong identifikasi dan penilaian risiko terkait perubahan iklim di Kepulauan Marshall. Hal ini melibatkan penelitian ilmiah dan pengumpulan data untuk memahami dampak perubahan iklim dan kerentanan yang terkait.

Mitigasi perubahan iklim, Kebijakan ini mendorong upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini mencakup pengembangan sumber energi terbarukan, efisiensi energi, dan praktik-praktik ramah lingkungan dalam sektor-sektor seperti pertanian, transportasi, dan industri.

Adaptasi perubahan iklim, Kebijakan ini mengakui pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim di Kepulauan Marshall. Ini mencakup upaya untuk membangun ketahanan masyarakat, melindungi infrastruktur kritis, dan mengembangkan strategi adaptasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Selanjutnya mengenai pendidikan dan kesadaran masyarakat, Kebijakan ini menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim. Ini mencakup penyuluhan, pelatihan, dan kampanye informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang perubahan iklim dan tindakan yang dapat diambil.

Kolaborasi internasional, Kebijakan ini mendorong kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim. Kepulauan Marshall bekerja sama dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan lembaga regional untuk bertukar pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

2.4.2.2 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Kepulauan Marshall sudah seringkali bergabung dalam negosiasi

terutama dengan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* dalam menyerukan tindakan global secara ambisius mengenai perubahan iklim. Kepulauan Marshall melalui UNFCC mengambil fokus yang lebih luas terhadap dimensi kesejahteraan non-fisik seperti mata pencaharian dan hak-hak lainnya seperti dalam bidang hukum, ekonomi, dan hak berdaulat dari dampak perubahan iklim (Government of RMI, 2020). Kepulauan Marshall sebagai salah satu pihak UNFCC dapat mengambil beberapa tindakan dalam partisipasinya terhadap masalah perubahan iklim, adapun tindakan tersebut antara lain:

1. Tile Til Eo 2050 Climate Strategy: Lighting the Way 2018, dengan caramelakukan pengurangan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti transportasi, pertanian, dan penggunaan energi. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan nol emisi dan penggunaan energi terbarukan sebesar 100% pada tahun 2050 (Government of RMI, 2020). Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat adaptasi terkait pembangunan berkelanjutan di masa depan bagi kesejahteraan masyarakat (Government of RMI, 2020).
2. Melakukan peningkatan terhadap ketahanan iklim, pemerintah dapat terlibat dalam melakukan koordinasi atas kerja sama terhadap perubahan iklim, hal ini diwujudkan melalui National Climate Change Policy (NCCPF) di mana menyajikan lima strategi dengan tujuan menyediakan solusi yang komprehensif

terkait perubahan iklim (Government of RMI, 2020).

3. Memberikan pelaporan secara konsisten terkait emisi yang dikeluarkan, sebagai salah satu pihak dalam UNFCCC, Kepulauan Marshall wajib dalam melakukan pelaporan emisi dan kemajuan-kemajuan terkait hal di bidang industrialisasi, serta Kepulauan Marshall juga berhak dalam menguraikan partisipasinya untuk aksi- aksi dan rencana-rencana dalam memerangi masalah perubahan iklim.
4. Water and Sanitation Policy and Proposed Action Plan 2016, kebijakan ini diusulkan dalam rangka memberikan perlindungan terkait lingkungan kepada Kepulauan Marshall dan kewenangan nasional terhadap sumber daya air terpadu dan pengelolaanya (Government of RMI, 2020).
5. Kepulauan Marshall turut berpartisipasi dalam melakukan negosiasi internasional di bawah UNFCCC, salah satu buktinya adalah di saat mengikuti *Conference of the Parties (COP)* dalam melakukan advokasiterkait tindakan global yang lebih konsisten dan kuat terhadap perubahan iklim.

2.4.2.3 Paris Agreement

Paris Agreement atau Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, ditandatangani pada tahun 2016 untuk menangani masalah

perubahan iklim dan memberikan solusi pada dampak yang dihasilkan. Perjanjian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kemampuan negara-negara untuk menghadapi dampak perubahan iklim di wilayahnya, serta untuk menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca dalam membatasi kenaikan suhu/temperatur global. Pemerintah Kepulauan Marshall telah menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Paris, dengan tujuan untuk membatasi kenaikan suhu global hingga jauh di bawah 2°C dan melakukan upaya untuk membatasinya hingga 1,5°C. Sebagai negara kepulauan yang kecil, negara ini sangat khawatir terhadap peningkatan volume atau intensitas air yang naik. Melalui dokumen yang berjudul "*Update Communication On The Marshall Islands Paris Agreement NDC*" dan telah disepakati oleh Presiden Kepulauan Marshall yakni David Kabua, dalam tulisannya diberikan informasi terkait rencana negara pada masa sekarang dan masa depan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Pembaruan terkait NDC melingkupi perincian terkait target dan strategi Kepulauan Marshall dalam mengurangi emisi di berbagai sektor, seperti energi, transportasi, dan pertanian. Dalam tulisan itu juga disoroti upaya negara dalam meningkatkan ketahanannya terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut dengan menerapkan langkah-langkah seperti perlindungan pesisir dan peningkatan pengelolaan air. Pembaruan terkait NDC atau yang disebut "*Nationally Determined Contributions*" juga diharapkan menjadi alat penting dalam melakukan pelacakan terhadap

kemajuan negara dalam mengomunikasikan upaya mereka kepada komunitas internasional (Government of RMI, 2020). NDC juga berpendapat bahwa masih dibutuhkannya pendekatan yang lebih komprehensif terkait keamanan dan perubahan iklim untuk memastikan langkah-langkah yang terintegrasi secara efektif ke dalam strategi keamanan internasional (Remling, 2023).

Melalui Paris Agreement, Kepulauan Marshall juga melakukan Program terkait *Reporting & Transparency* untuk memberikan laporan secara berkala tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi emisi dan mengatasi perubahan iklim. Mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan data dan informasi terkait perubahan iklim.

2.4.2.4 South Pacific Regional Environmental Programme (SPREP)

Program Lingkungan Regional Pasifik Selatan merupakan organisasi yang dibentuk antar pemerintah regional yang berlokasi di Apia, Samoa (SPREP, 2021). SPREP didirikan pada tahun 1987 oleh negara-negara di Kawasan Pasifik dan termasuk Kepulauan Marshall. SPREP memiliki sekitar 150 staf yang direkrut dari seluruh Kawasan Pasifik dan dunia serta memiliki anggaran tahunan sekitar 35 juta dollar pada tahun 2022 (Fund, 2021). Adapun keanggotaan SPREP terdiri dari 21 negara, diantaranya adalah Samoa, Fiji, Kepulauan Marshall, Nauru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan termasuk beberapa negara metropolitan seperti Australia, Prancis, Selandia Baru (SPREP, 2021). SPREP memiliki 4 tujuan regional, yaitu : Pertama, Masyarakat Pasifik mendapat manfaat dari penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kedua, Masyarakat Pasifik mendapat manfaat

dari ekosistem pulau dan laut. Ketiga, Masyarakat Pasifik memperoleh manfaat dari pengelolaan limbah yang lebih baik dan polusi menjadi terkendali. Keempat, Masyarakat Pasifik dan lingkungannya memperoleh manfaat dari komitmen dan praktik kelola lingkungan (SPREP, 2021).

Adapun prioritas utama dari SPREP adalah terkait Ketahanan Perubahan Iklim, Ekosistem Pulau dan Laut, Pengelolaan Limbah dan Pengendalian, Polusi yang Efektif, Tata Kelola Lingkungan, Pendekatan SPREP terhadap tantangan lingkungan di Kawasan Pasifik, prioritas tersebut dilandasi dengan nilai-nilai yang menghargai Lingkungan, Masyarakat Pasifik, Integritas (SPREP, 2021). Dibentuknya SPREP adalah untuk mengatasi masalah lingkungan regional dan mempromosikan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan.

Fokus utama dari SPREP adalah terkait perubahan iklim, pengelolaan limbah, kesehatan laut, dan keanekaragaman hayati. SPREP merupakan bukti nyata bahwa negara-negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim sehingga diperlukan langkah-langkah adaptasi dan respon kebijakan yang efektif dalam mengatasi tantangan tersebut (Mimura, 1999). SPREP juga membutuhkan bantuan berupa peningkatan kapasitas serta dukungan dalam melaksanakan proyek-proyek dan prakarsa lingkungan kepada negara-negara anggotanya. Kepulauan Marshall juga turut memberikan partisipasinya dalam melindungi dan memperbaiki lingkungan di Kawasan Pasifik melalui SPREP. Organisasi ini berkerja erat dengan negara anggotanya, termasuk Kepulauan Marshall dalam mengatasi

tantangan lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa program yang dilakukan oleh Kepulauan Marshall dalam SPREP antara lain :

1. Program Pengelolaan Sampah, Kepulauan Marshall terlibat dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk pengurangan, daur ulang, dan pembuangan yang aman. Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
2. Program Konservasi Laut, Kepulauan Marshall berkomitmen untuk melindungi ekosistem pesisir dan laut mereka. Mereka terlibat dalam program konservasi yang meliputi pengelolaan terumbu karang, perlindungan spesies laut, dan pengendalian penangkapan ikan yang berkelanjutan.
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kepulauan Marshall bekerja sama dengan SPREP untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan terkait sumber daya alam mereka, termasuk pengelolaan hutan, pengelolaan air, dan perlindungan lingkungan daratan.
4. Program Penanggulangan Perubahan Iklim, Kepulauan Marshall aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim. Mereka berpartisipasi dalam program pengurangan emisi gas rumah kaca, pengembangan energi terbarukan, peningkatan ketahanan terhadap bencana, dan peningkatan pemahaman

tentang perubahan iklim di kalangan masyarakat.

5. Program Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan, Kepulauan Marshall mendukung program-program pendidikan dan kesadaran lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan. Program ini mencakup kampanye publik, pelatihan, dan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dan masyarakat.

Adapun bantuan yang diberikan SPREP kepada Kepulauan Marshall adalah terkait pengasaman dan pencegahan pencemaran laut, selain itu SPREP juga berkolaborasi dalam memprakarsai terkait proyek lingkungan regional, seperti *Pacific Climate Outlook Forum* dan *Pacific Meteorological and Hydrological Services Network*. Secara keseluruhan, SPREP dan Kepulauan Marshall memiliki hubungan yang cukup erat dan kooperatif yang dibuktikan dengan bantuan dan dukungan teknis dalam membantu negara tersebut dalam mengatasi tantangan lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut dilakukan juga untuk menunjukkan komitmen Kepulauan Marshall dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan peran kepemimpinannya di Kawasan Kepulauan Pasifik (SPREP, 2021).

Secara Keseluruhan, SPREP didirikan pada tahun 1987 dan memiliki tujuan regional dalam penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, perlindungan ekosistem pulau dan laut, pengelolaan limbah yang lebih baik,

dan komitmen terhadap praktik pengelolaan lingkungan. Kepulauan Marshall berpartisipasi dalam berbagai program SPREP, termasuk pengelolaan sampah, konservasi laut, pengelolaan sumber daya alam, penanggulangan perubahan iklim, dan pendidikan lingkungan. SPREP memberikan bantuan teknis dan dukungan kepada Kepulauan Marshall dalam mengatasi tantangan lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di wilayah Pasifik Selatan. Kepulauan Marshall menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan lingkungan dan kepemimpinan di Kawasan Kepulauan Pasifik.